

<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.390>

Implementasi Program Intervensi Gizi Terhadap Penurunan Stunting di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

¹⁾Julia Eka Cesar Suwanti, ²⁾Lailul Mursyidah

^{1),2)} Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Corresponding Author : juliaekacesarsuwanti@gmail.com

Abstract

Stunting remains high in rural coastal areas despite routine nutrition intervention programs, highlighting a gap between policy objectives and local outcomes. This study aims to analyze the implementation of the Nutrition Intervention Program in Tambak Kalisogo Village, Sidoarjo, using (Dwiyanto, 2005) framework: goal clarity, organizational capacity, coordination, accountability, and community participation. A descriptive qualitative method was applied through interviews, observations, and documentation involving village officials, midwives, posyandu cadres, and parents of stunted toddlers. The results show that program execution complies with technical procedures but remains suboptimal in significantly reducing stunting rates. Primary obstacles include limited cadre capacity, administrative-focused coordination, underutilized e-PPGBM data, and community participation that fails to foster dietary behavioral changes. Overall, program implementation focuses heavily on activity outputs rather than sustainable outcomes. Strengthening implementer capacity, integrating cross-sector coordination, and empowering communities are essential to enhance program effectiveness.

Keywords: *Stunting, Nutrition iIntervention, Policy implementation*

Abstrak

Permasalahan stunting di wilayah pedesaan pesisir masih menunjukkan prevalensi tinggi meskipun program intervensi gizi telah dilaksanakan secara rutin, mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan capaian outcome di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Intervensi Gizi dalam penurunan stunting di Desa Tambak Kalisogo, Sidoarjo, menggunakan teori implementasi (Dwiyanto, 2005) yang mencakup kejelasan tujuan, kapasitas organisasi, koordinasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, bidan, kader posyandu, serta orang tua balita stunting. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program telah berjalan sesuai prosedur teknis, namun belum optimal menurunkan angka stunting secara signifikan. Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas kader, koordinasi yang sebatas administratif, belum optimalnya pemanfaatan data e-PPGBM, serta partisipasi masyarakat yang belum mendorong perubahan perilaku gizi keluarga. Secara keseluruhan, implementasi program masih berorientasi pada output kegiatan dibandingkan outcome berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana, koordinasi terintegrasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting.



Kata kunci: *Stunting, Intervensi Gizi, Implementasi Kebijakan*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, tingkat kecerdasan, serta produktivitas individu di masa depan. Profil Kesehatan permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Penelitian Black, Victora, Walker, Bhutta, dan Christian (2013) berjudul *“Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries”* menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa awal kehidupan berdampak signifikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas ekonomi individu di masa dewasa. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa intervensi gizi merupakan langkah penting dalam mencegah stunting. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program intervensi gizi, baik intervensi spesifik maupun sensitif, sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diterjemahkan dan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, hingga kader posyandu dan masyarakat (Dwiyanto, 2005).

Intervensi gizi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki status gizi individu atau kelompok melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik meliputi pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, pemantauan pertumbuhan balita, dan edukasi gizi kepada ibu, sedangkan intervensi gizi sensitif meliputi perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan peningkatan ketahanan pangan keluarga. Penelitian Putri, Nugroho, dan Lestari (2020) berjudul *“Implementasi Kebijakan Gizi dalam Penurunan Stunting di Tingkat Desa”* menunjukkan bahwa program intervensi gizi telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan, dan edukasi gizi, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program masih dipengaruhi oleh kualitas implementasi, kapasitas pelaksana, dan tingkat partisipasi Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi gizi tidak hanya bergantung pada program yang dirancang, tetapi juga pada bagaimana program tersebut dilaksanakan.

Pelaksanaan intervensi gizi di Indonesia berlandaskan pada kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting). Kebijakan ini menekankan pendekatan konvergensi lintas sektor dari tingkat pusat



hingga desa. Integrasi kebijakan antarlevel pemerintahan menjadi faktor kunci dalam efektivitas program penurunan stunting. Di tingkat daerah dan desa, kebijakan tersebut diterjemahkan melalui kegiatan posyandu, pemberian PMT, dan pemanfaatan aplikasi e-PPGBM. Penelitian Sari & Handayani (2022) berjudul “Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Balita di Pedesaan” menyimpulkan bahwa meskipun program telah dijalankan sesuai prosedur, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa dan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan berkelanjutan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program intervensi gizi sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting, termasuk di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon. Program intervensi gizi di desa ini dilaksanakan melalui kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan pemantauan status gizi balita melalui aplikasi e-PPGBM. Namun demikian, berdasarkan data posyandu dan laporan pemerintah desa, masih ditemukan balita dengan status stunting meskipun program telah dilaksanakan secara rutin. Penelitian Rahmawati, Wibowo, dan Prasetyo (2021) berjudul “Faktor Sosial Ekonomi dan Kejadian Stunting di Wilayah Pesisir” menunjukkan bahwa kejadian stunting dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan pola asuh anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi gizi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan keterlibatan keluarga dalam mendukung program.

implementasi program intervensi gizi pada level desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Secara khusus, kajian yang menelaah implementasi program intervensi gizi di Desa Tambak Kalisogo masih sangat terbatas, terutama yang mengaitkan data stunting lokal dengan proses implementasi kebijakan. Kecamatan Jabon ialah sebuah wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang masih menghadapi tantangan terkait permasalahan gizi balita, termasuk stunting, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, akses terhadap pangan bergizi, serta perilaku kesehatan menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program intervensi gizi di wilayah ini (Rahmawati et al., 2021).



Tabel 1. Data validasi stunting di Desa Tambak Kalisogo 2024

Status Gizi	Jenis Kelamin & Jumlah		Total
Normal	P = 5	L = 3	8
Pendek	P = 7	L = 10	17
Sangat Pendek	P = 1	L = 2	3

Sumber: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM)

Berdasarkan data validasi stunting Desa Tambak Kalisogo tahun 2024 yang bersumber dari pencatatan posyandu dan sistem e-PPGBM, menunjukkan bahwa masih terdapat balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek. Dari total 28 Data ini menunjukkan bahwa sekitar 71,4% balita dalam data validasi masih mengalami stunting, yang mengindikasikan bahwa permasalahan stunting di Desa Tambak Kalisogo masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program intervensi gizi seperti kegiatan posyandu rutin, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan pemantauan status gizi telah dilaksanakan, namun permasalahan stunting masih belum sepenuhnya teratasi secara optimal. Keberadaan balita dengan status pendek dan sangat pendek menunjukkan bahwa intervensi gizi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menghasilkan outcome berupa perbaikan status gizi balita secara menyeluruh. Data validasi stunting ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi program intervensi gizi di tingkat desa, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program intervensi gizi dalam menurunkan angka stunting dengan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi program intervensi gizi, khususnya terkait kapasitas pelaksana, koordinasi antaraktor, pemanfaatan dan partisipasi masyarakat, agar program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih efektif dalam menurunkan angka stunting di Desa Tambak Kalisogo.

Salah satu instrumen penting dalam monitoring dan evaluasi program intervensi gizi adalah aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi ini digunakan oleh kader posyandu dan petugas kesehatan untuk mencatat data antropometri balita, status gizi, serta cakupan layanan gizi secara berkala. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa e-PPGBM berperan penting dalam menyediakan data stunting yang akurat dan real-time sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program penurunan stunting di tingkat desa dan.



Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program intervensi gizi dan hasil yang dicapai di lapangan. Penelitian (Sari & Handayani, 2022) berjudul “Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Balita di Pedesaan” menunjukkan bahwa program pemberian makanan tambahan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka stunting secara signifikan karena keterbatasan pendampingan, kapasitas kader, dan rendahnya perubahan perilaku gizi keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan intervensi gizi.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Dwiyanto (2005), yang menekankan lima indikator utama, yaitu kejelasan tujuan dan standar kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, koordinasi antaraktor, akuntabilitas pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat. Teori ini relevan untuk menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan hasil implementasi program intervensi gizi di tingkat desa. Relevansi penggunaan teori ini diperkuat oleh penelitian (Yuliana et al., 2021) yang menunjukkan bahwa kegagalan program kesehatan di tingkat desa seringkali disebabkan oleh lemahnya kapasitas pelaksana dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, penelitian (Sari & Handayani, 2022) juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat yang hanya bersifat kehadiran formal tanpa perubahan perilaku menjadi faktor penghambat keberhasilan program penurunan stunting. Dengan demikian, indikator teori Dwiyanto (2005) dapat digunakan sebagai alat analisis yang komprehensif dalam penelitian ini.

Selain itu Teori implementasi dalam penelitian ini diperkuat oleh pemikiran Mursyidah (2021) dalam Implementasi Kebijakan Publik Berbasis *Good Governance* di Tingkat Lokal, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa sangat ditentukan oleh penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas substantif, partisipasi aktif masyarakat, serta sinergi antar pemangku kepentingan, sehingga kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif tetapi mampu menghasilkan perubahan perilaku dan dampak nyata bagi masyarakat, serta teori George C. Edwards III (1980) dalam *Implementing Public Policy*, yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dimana kebijakan yang dirancang dengan baik dapat mengalami kegagalan apabila tidak dikomunikasikan secara jelas, tidak didukung sumber daya yang memadai, atau terhambat oleh struktur birokrasi yang kurang efektif. Sintesis kedua teori tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, dukungan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat secara substantif dalam proses pelaksanaan kebijakan.



Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Intervensi Gizi dalam upaya penurunan stunting di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Dwiyanto (2005), yang meliputi kejelasan tujuan dan standar kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, koordinasi antaraktor, akuntabilitas pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, serta mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu menghasilkan outcome berupa perubahan perilaku gizi keluarga dan penurunan angka stunting secara berkelanjutan di tingkat desa.

KAJIAN PUSTAKA

Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi jangka panjang pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berdampak buruk pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak, sehingga memerlukan penanganan komprehensif melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif (Black et al., 2013; WHO, 2020). Keberhasilan program intervensi gizi berbasis Perpres No. 72 Tahun 2021 sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan di tingkat local, di mana kecukupan sumber daya, kejelasan komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi faktor krusial, yang dianalisis secara komprehensif melalui dimensi kejelasan tujuan, kapasitas organisasi, koordinasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Dwiyanto, 2005). Keberhasilan tersebut diperkuat oleh penerapan prinsip *good governance* lokal, seperti transparansi, akuntabilitas substantif, dan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan menghasilkan dampak nyata (Mursyidah, 2021). Meskipun demikian, mayoritas penelitian terdahulu masih berfokus pada efektivitas klinis-medis intervensi gizi (Ruel & Alderman, 2013) atau sebatas kepatuhan prosedur administratif konvensional di tingkat lokal (Sari & Handayani, 2022).

Terdapat *theoretical gap* di mana studi-studi sebelumnya cenderung mengasumsikan bahwa pemenuhan *output* kegiatan dan administrasi formal (seperti distribusi PMT dan pelaporan aplikasi e-PPGBM) secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan angka stunting, serta belum secara terintegrasi menguji sintesis antara kerangka *good governance* lokal (Mursyidah, 2021) dengan indikator implementasi kebijakan (Dwiyanto, 2005) pada konteks masyarakat pedesaan pesisir. Oleh karena itu, kajian ini mengisi celah teoritis tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana ketimpangan antara pemenuhan prosedur teknis (*procedural compliance*) dan pencapaian perubahan perilaku gizi berkelanjutan (*substantive outcome*) terjadi dalam pelaksanaan intervensi gizi di tingkat desa.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi program intervensi stunting di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, sebagai lokasi penelitian yang dipilih karena merupakan salah satu desa dengan kasus stunting dan telah melaksanakan program intervensi melalui pemerintah desa, puskesmas, dan kader posyandu. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi program intervensi stunting yang meliputi pelaksanaan program, koordinasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, ketepatan sasaran berdasarkan data validasi stunting, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka stunting. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Perangkat desa, kader posyandu, dan orang tua anak stunting, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen seperti data validasi stunting, laporan kegiatan, dan profil desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati pelaksanaan program secara langsung, wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari informan.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program intervensi stunting, dengan informan yang terdiri dari informan kunci yaitu Perangkat Desa (Kasi Pelayanan) dan Bidan Desa, informan utama yaitu kader posyandu, serta informan pendukung yaitu orang tua anak stunting. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis, mendalam, dan akurat mengenai implementasi program intervensi stunting di Desa Tambak Kalisogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program intervensi gizi di Desa Tambak Kalisogo dilaksanakan sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dengan kebijakan nasional dan kabupaten. Bentuk intervensi yang dijalankan meliputi kegiatan posyandu rutin, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, edukasi gizi kepada ibu balita, serta pencatatan status gizi melalui aplikasi e-PPGBM. Implementasi program melibatkan pemerintah desa, puskesmas, bidan desa, kader posyandu, serta masyarakat sebagai sasaran utama program.

Implementasi kebijakan publik ialah langkah penting yang menentukan apakah



suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks pengurangan stunting, efektivitas program intervensi gizi tidak hanya bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dirancang, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di tingkat desa, yang merupakan tingkat terdekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini menganalisis implementasi program intervensi gizi di Desa Tambak Kalisogo menggunakan teori implementasi kebijakan Agus Dwiyanto (2005), yang menekankan lima dimensi utama, yakni kejelasan tujuan dan standar kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, koordinasi antaraktor, akuntabilitas pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat.

A. Standar Kebijakan

Berdasarkan data e-PPGBM dan laporan posyandu Desa Tambak Kalisogo, dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan jumlah balita stunting meskipun belum signifikan. Penurunan tersebut menunjukkan adanya progres sebesar 20% dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, proporsi balita dengan status pendek dan sangat pendek masih tergolong tinggi, yakni 71,4% dari data validasi tahun 2024.

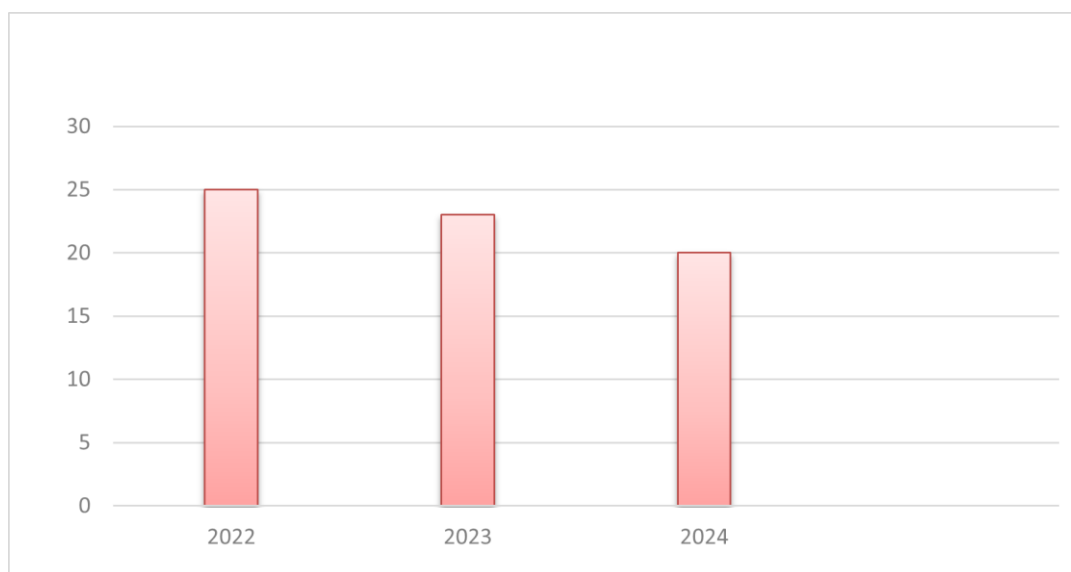


Figure 1. Progres Penurunan Stunting di Desa Tambak Kalisogo 2022-2024

Sumber : Data e-ppgbm dan Laporan Posyandu Desa Tambak Kalisogo

Kondisi ini menunjukkan bahwa standar kebijakan secara normatif telah dijalankan, namun capaian outcome masih memerlukan penguatan implementasi yang lebih substantif. pelaksanaan program di desa telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pendekatan konvergensi dan intervensi berbasis 1.000 HPK. Secara administratif, standar pelaksanaan telah dipenuhi melalui kegiatan posyandu rutin, pencatatan

antropometri, serta pelaporan melalui e-PPGBM. Pelaksanaan PMT di Desa Tambak Kalisogo dilakukan melalui kegiatan posyandu setiap bulan dengan sasaran balita stunting, balita risiko stunting, serta ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK). PMT diberikan dalam bentuk makanan olahan berbasis protein dan energi, seperti bubur kacang hijau, telur, biskuit balita fortifikasi, serta menu tambahan berbahan dasar ikan dan sayur yang disesuaikan dengan potensi lokal wilayah pesisir.

Distribusi PMT dilakukan secara langsung saat kegiatan posyandu, disertai edukasi mengenai cara pengolahan makanan bergizi seimbang di rumah. Untuk balita dengan kategori sangat pendek, kader bersama bidan desa melakukan pemantauan khusus melalui kunjungan rumah (home visit) minimal satu kali dalam satu bulan untuk memastikan konsumsi PMT berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan PMT masih cenderung berorientasi pada pembagian makanan tambahan, belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendampingan perubahan pola makan keluarga secara konsisten. Berdasarkan perbandingan pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan progres baik dari sisi cakupan maupun pola pendampingan. Pada tahun 2022, dilakukan posyandu dan pemeriksaan pada balita stunting dan edukasi pemberian gizi pada anak yang diberikan satu kali setiap bulan kepada 25 balita stunting.

Memasuki tahun 2023, jumlah balita stunting menurun menjadi 23 anak, dengan peningkatan frekuensi mulai dilakukan pendampingan terbatas bagi keluarga berisiko. Pada tahun 2024, jumlah balita stunting Kembali menurun menjadi 20 anak, upaya penurunan semakin diperkuat dengan adanya PMT yang di distribusikan setiap hari dengan penerapan home visit. PMT ini dilakukan selama 4 bulan terakhir tahun 2024. Namun demikian, penurunan jumlah kasus masih berlangsung secara gradual, yang mengindikasikan bahwa peningkatan intensitas program belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku gizi keluarga secara konsisten. Dengan demikian, progres PMT menunjukkan perbaikan pada aspek proses implementasi, tetapi outcome penurunan stunting masih memerlukan penguatan strategi pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan.

B. Kapasitas Organisasi Pelaksana

Desa Tambak Kalisogo memiliki 20 kader posyandu yang bertugas melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita, pemberian PMT, serta edukasi gizi. Secara kelembagaan, struktur pelaksana program telah terbentuk dengan baik dan didukung oleh pemerintah desa serta puskesmas. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa jumlah kader tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah balita sasaran, khususnya balita stunting yang memerlukan pendampingan



intensif.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia berdampak pada pelaksanaan program yang lebih terfokus pada kegiatan rutin posyandu, sementara pendampingan rumah tangga untuk memantau pola makan dan perilaku kesehatan keluarga belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal ini memperlihatkan bila kapasitas organisasi pelaksana masih belum memadai untuk menjangkau seluruh sasaran secara intensif. (Dwiyanto, 2005) menegaskan bahwa kapasitas organisasi pelaksana mencakup kecukupan sumber daya manusia, kompetensi teknis, dan dukungan sarana serta prasarana. Keterbatasan aspek ini akan berimplikasi pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. (Sari & Handayani, 2022) menyatakan bahwa keterbatasan jumlah dan kapasitas kader posyandu menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas program intervensi gizi di wilayah pedesaan. Dengan demikian, kapasitas organisasi pelaksana di Desa Tambak Kalisogo masih perlu diperkuat agar program intervensi gizi dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan stunting. Dalam aspek kapasitas organisasi pelaksana, koordinasi pelaksanaan PMT menunjukkan perkembangan bertahap dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, koordinasi PMT masih bersifat internal posyandu, yaitu antara kader dan bidan desa, dengan mekanisme pelaporan manual kepada pemerintah desa setiap akhir bulan. Pada tahap ini, distribusi PMT dilakukan setelah kegiatan penimbangan tanpa perencanaan lintas sektor yang terstruktur. Memasuki tahun 2023, koordinasi mulai melibatkan pemerintah desa dalam perencanaan anggaran dan penjadwalan kegiatan, sehingga pelaksanaan PMT tidak hanya menjadi agenda kesehatan, tetapi juga masuk dalam pembahasan musyawarah desa. Selain itu, data balita stunting mulai dikonsolidasikan melalui aplikasi e-PPGBM untuk menentukan sasaran prioritas. Pada tahun 2024, koordinasi semakin terstruktur dengan adanya rapat evaluasi berkala antara perangkat desa, bidan desa, dan kader posyandu, serta penerapan sistem home visit untuk balita sangat pendek sebagai tindak lanjut hasil monitoring. Tahapan koordinasi ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan secara gradual, dari koordinasi administratif menuju koordinasi yang lebih integratif dan berbasis data.

C. Koordinasi Antaraktor

Program penurunan stunting di Desa Tambak Kalisogo melibatkan berbagai aktor, antara lain pemerintah desa, puskesmas, bidan desa, dan kader posyandu. Koordinasi antaraktor telah dilakukan melalui kegiatan posyandu, rapat koordinasi, serta pelaporan data status gizi balita melalui aplikasi e-PPGBM. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi tersebut masih menghadapi kendala,



terutama keterlambatan input data dan kurangnya tindak lanjut terpadu terhadap balita stunting. *“Koordinasi dengan desa dan kader sudah berjalan, tetapi kadang data dari posyandu masuk terlambat, sehingga tindak lanjut balita stunting tidak bisa langsung dilakukan.”* (Wawancara Perangkat Desa, 15 Juli 2025). Keterlambatan data menyebabkan intervensi lanjutan, seperti pendampingan keluarga dan rujukan layanan kesehatan, tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak lanjut program. Menurut (Dwiyanto, 2005), koordinasi yang efektif harus mampu menyinergikan peran dan sumber daya antaraktor agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Koordinasi yang lemah berpotensi menyebabkan program berjalan parsial dan tidak menghasilkan dampak yang signifikan.

Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam program kesehatan menyebabkan intervensi tidak berjalan secara komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas koordinasi antaraktor menjadi kebutuhan mendesak dalam implementasi program intervensi gizi di Desa Tambak Kalisogo (Yuliana et al., 2021). koordinasi antaraktor berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan PMT sebagai strategi penurunan stunting. Berdasarkan temuan lapangan, PMT di Desa Tambak Kalisogo masih dapat dilanjutkan karena didukung oleh komitmen pemerintah desa, ketersediaan kader posyandu, serta dukungan teknis dari bidan desa dan puskesmas. Penurunan jumlah balita stunting dari 25 kasus pada tahun 2022 menjadi 20 kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa PMT memberikan dampak positif secara gradual. Namun demikian, keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan distribusi makanan tambahan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi dalam menindaklanjuti hasil monitoring.

Apabila koordinasi tetap bersifat administratif tanpa evaluasi terpadu dan intervensi lanjutan berbasis data, maka PMT berpotensi hanya menjadi program rutin tanpa dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindak lanjut balita stunting belum selalu dilakukan secara cepat akibat keterlambatan input data dan belum optimalnya integrasi lintas sektor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa outcome PMT saat ini berada pada tahap perbaikan proses, namun belum sepenuhnya mencapai perubahan perilaku gizi keluarga secara konsisten. Dengan demikian, program PMT dapat dan layak untuk dilanjutkan sebagai instrumen penurunan stunting, tetapi perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih integratif, pemanfaatan data e-PPGBM sebagai dasar pengambilan keputusan, serta sinergi dengan intervensi sensitif seperti sanitasi dan ketahanan pangan keluarga agar mampu menghasilkan penurunan angka stunting yang lebih signifikan dan berkelanjutan.



D. Akuntabilitas Pelaksanaan

Secara administratif, pelaksanaan program intervensi gizi di Desa Tambak Kalisogo telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Setiap kegiatan posyandu, pemberian PMT, serta pemantauan status gizi balita dicatat dan dilaporkan melalui e-PPGBM serta laporan pemerintah desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil monitoring tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan program. *"Data dari e-PPGBM selalu kami laporkan, tetapi belum semuanya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program di tingkat desa."* (Wawancara Perangkat Desa, 15 Juli 2025). Akuntabilitas pelaksanaan masih dominan pada aspek pelaporan administratif, sementara akuntabilitas substantif, yaitu penggunaan data untuk meningkatkan kualitas program dan menurunkan angka stunting secara nyata, belum optimal.

Hal ini menyebabkan program berjalan secara rutin, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi lapangan. (Dwiyanto, 2005) menekankan bahwa akuntabilitas kebijakan publik selain diukur dari kelengkapan laporan, namun dari sejauh mana kebijakan menyerahkan dampak nyata untuk masyarakat. Ketika data monitoring tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka potensi perbaikan program menjadi terbatas. (R. N. Putri et al., 2023) yang menyatakan bahwa lemahnya pemanfaatan data monitoring dan evaluasi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya efektifitas program penurunan stunting di tingkat lokal.

E. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program intervensi gizi di Desa Tambak Kalisogo tergolong cukup baik pada tahap kehadiran dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan perilaku gizi di tingkat rumah tangga. Sebagian orang tua masih memberikan makanan instan kepada anak karena alasan kepraktisan dan kebiasaan. *"Saat kegiatan posyandu banyak yang hadir, tetapi penerapan di rumah belum tentu. Masih ada orang tua yang memberi makanan instan karena dianggap praktis."* (Wawancara Kader Posyandu, 15 Juli 2025). Partisipasi masyarakat masih dominan pada tahap kehadiran dalam kegiatan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap perubahan perilaku. (Dwiyanto, 2005) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran fisik, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dan perubahan perilaku yang mendukung tujuan kebijakan.

Partisipasi yang bersifat formal tanpa perubahan perilaku akan membatasi pencapaian outcome kebijakan. rendahnya perubahan perilaku gizi keluarga menjadi penyebab utama lambatnya penurunan stunting di wilayah pesisir dan pedesaan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Tambak Kalisogo masih perlu



ditingkatkan agar program intervensi gizi dapat berkelanjutan dan berdampak nyata.

Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses implementasi kebijakan. Ketidakefektifan pada satu dimensi akan memengaruhi dimensi lainnya. Kelemahan dalam pemahaman tujuan kebijakan memperlemah partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas pelaksana membatasi kualitas koordinasi dan pendampingan, koordinasi yang lemah menghambat akuntabilitas substantif, dan rendahnya akuntabilitas substantif mengurangi efektivitas pembelajaran kebijakan. Rangkaian kondisi ini menyebabkan implementasi program intervensi gizi di Desa Tambak Kalisogo lebih berorientasi pada pencapaian output dibandingkan outcome.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperkuat hasil penelitian Putri et al. (2020), (Sari & Handayani (2022), dan Rahmawati et al., (2021) yang menyatakan bahwa kegagalan program penurunan stunting di tingkat lokal biasanya dikarenakan kurangnya kualitas implementasi kebijakan, bukan oleh ketiadaan program. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak cukup diukur dari keberlangsungan program dan kelengkapan administrasi, tetapi harus dilihat dari kemampuan kebijakan dalam mendorong perubahan perilaku gizi dan kondisi kesehatan masyarakat secara nyata.

Program Intervensi Gizi di Desa Tambak Kalisogo berada pada fase implementasi prosedural, belum mencapai implementasi substantif. Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaksana, integrasi koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data e-PPGBM sebagai instrumen evaluasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama penurunan stunting. Sintesis ini menegaskan relevansi teori implementasi kebijakan (Dwiyanto, 2005) sebagai kerangka analisis yang mampu menjelaskan kesenjangan antara kebijakan dan hasil di tingkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program intervensi gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam upaya penurunan stunting di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan standar kebijakan nasional dan prosedur teknis yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan posyandu rutin, distribusi PMT, pencatatan melalui e-PPGBM, serta adanya koordinasi antara kader, bidan desa, dan pemerintah desa. Dari sisi capaian, terdapat tren penurunan jumlah balita stunting dari tahun 2022 hingga 2024, meskipun penurunannya masih bersifat gradual dan belum signifikan secara prevalensi.



Pada aspek kapasitas organisasi pelaksana, terjadi peningkatan koordinasi secara bertahap, mulai dari koordinasi internal posyandu hingga pelibatan pemerintah desa dalam perencanaan dan evaluasi program. Koordinasi antaraktor juga menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih terstruktur, termasuk penerapan kunjungan rumah (home visit) bagi balita kategori sangat pendek. Namun demikian, implementasi masih menghadapi kendala pada optimalisasi koordinasi lintas sektor dan konsistensi pendampingan keluarga dalam perubahan pola asuh dan pola makan. Dengan demikian, program PMT layak untuk dilanjutkan sebagai bagian dari strategi penurunan stunting di Desa Tambak Kalisogo, tetapi memerlukan penguatan pada aspek integrasi data, evaluasi berbasis outcome, sinergi intervensi sensitif, serta pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan agar mampu menghasilkan penurunan angka stunting yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Dewi, A. P., & Rahmawati, E. (2023). Peran kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita stunting di daerah pesisir. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 18(2), 112–120. <https://doi.org/10.14710/jpki.18.2.112-120>
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fristanti, D., & Haryanto, B. (2022). Efektivitas pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan pada balita gizi kurang dan stunting. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(1), 55–64. <https://doi.org/10.35451/jkg.v14i1.1012>
- Fitriani, N., & Lestari, Y. (2021). Evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(3), 145–154. <https://doi.org/10.22146/jkki.v10i3.67890>
- Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam program penanganan stunting. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 201–212. <https://doi.org/10.26905/jiap.v8i2.4521>
- Mursyidah, L. (2021). Implementasi kebijakan publik berbasis good governance di tingkat lokal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i1.1234>



- Nugroho, A. S., & Indriani, D. (2022). Pemanfaatan sistem informasi e-PPGBM dalam intervensi gizi spesifik balita stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(4), 210–218. <https://doi.org/10.26714/jkmi.17.4.210-218>
- Putri, A. D., Nugroho, R., & Lestari, S. (2020). Implementasi kebijakan gizi dalam penurunan stunting di tingkat desa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123–132. <https://doi.org/10.15294/kemas.v15i2.19820>
- Putri, R. N., Maharani, A., & Handayani, S. (2023). Pemanfaatan data e-PPGBM dalam pemantauan dan evaluasi program stunting di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.22146/jkki.v12i1.78901>
- Rahmawati, D., Wibowo, A., & Prasetyo, B. (2021). Faktor sosial ekonomi dan kejadian stunting di wilayah pesisir. *Jurnal Gizi Indonesia*, 9(1), 45–54. <https://doi.org/10.14710/jgi.9.1.45-54>
- Ruel, M. T., Alderman, H., & Maternal and Child Nutrition Study Group. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet*, 382(9891), 536–551. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0)
- Sari, N., & Handayani, R. (2022). Evaluasi program pemberian makanan tambahan balita di pedesaan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(2), 89–101. <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i2.2022.89-101>
- Suryani, T., & Astuti, P. (2024). Tantangan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di tingkat pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*, 6(1), 78–89. <https://doi.org/10.31289/japad.v6i1.2345>
- Wulandari, S., & Utami, R. (2023). Partisipasi masyarakat dan perubahan perilaku gizi keluarga balita stunting di daerah pedesaan. *Jurnal Administrasi Sosial dan Kebijakan Publik*, 5(2), 102–115. <https://doi.org/10.25077/jaskp.v5i2.4321>
- Yuliana, E., Suryani, L., & Wijaya, A. (2021). Hambatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting pada level pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(3), 210–222. <https://doi.org/10.18196/jipkp.v8i3.11220>

